



## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan pada 34 Provinsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Tahun Periode 2019-2023)

Riski Doni Damara<sup>1\*</sup>, Madnasir<sup>2</sup>, Nurhayati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Raden Intan, Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: [rizkidoni06@gmail.com](mailto:rizkidoni06@gmail.com)<sup>1</sup>, [madnasir@radenintan.ac.id](mailto:madnasir@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>, [nurhayati@radenintan.ac.id](mailto:nurhayati@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [rizkidoni06@gmail.com](mailto:rizkidoni06@gmail.com)

**Abstract.** Often, backward territories exploit the inequalities of economic and social development to enhance their own economic potential. It can boost economic growth by encouraging innovation and efforts to harness existing local resources. It is important to remember that no development model is suitable for all because each region has different potential and difficulties. The research consists of a free variable, namely economic growth (GDP), investment, and population, and a bound variable that is the inequality of economic development. The aim of this study is to identify the factors that influence the inequality of economic development in Indonesia both simultaneously and partially. The hypothesis is tested using the panel data regression method. Data analyzed with the Eviews10 program. The results of the research showed that in the F (simultaneous) test, economic growth, investment, and population numbers had a positive and significant influence on the inequality of economic development with a sig value of  $F 0.03 < 0.05$ . The results of the t (partial) test showed that economic growth did not have a significant impact on economic development inequality, with a sigt value of  $0,054 > 0.05$ , investment had no significant impact, with sigt values of  $0,93 > 0.05$  and the population variable had a significant effect on the inequity of economic development, with the sigt worth of  $0,02 < 0.05$ . So it can be concluded that only the population variable has a significant influence on the economic development inequality of the 34 provinces in Indonesia.

**Keywords:** Inequality, economic growth, investment, population.

**Abstrak.** Seringkali, wilayah yang tertinggal memanfaatkan ketimpangan pembangunan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan potensi ekonomi mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong inovasi dan upaya untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Penting untuk diingat bahwa tidak ada model pembangunan yang sesuai untuk semua karena setiap wilayah memiliki potensi dan kesulitan yang berbeda. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB), investasi, dan jumlah penduduk, dan variabel terikat, yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Uji hipotesis dilakukan dengan metode regresi data panel. Data dianalisis dengan program Eviews10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji F (simultan) pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi dengan nilai sig F  $0.03 < 0.05$ . Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi, dengan nilai sig t  $0,054 > 0.05$ , investasi tidak berdampak signifikan, dengan nilai sig t  $0,93 > 0.05$ , dan variabel populasi berdampak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi, dengan nilai sig t  $0,02 < 0.05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya variabel jumlah penduduk yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada 34 provinsi di Indonesia.

**Kata kunci:** Ketimpangan, Pertumbuhan ekonomi, investasi, jumlah penduduk.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama bagi banyak negara, terutama bagi negara-negara berkembang. Pembangunan ekonomi memang dianggap sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Definisi umum dari pembangunan ekonomi adalah proses di mana pendapatan perkapita masyarakat meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun, penting untuk diingat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan pendapatan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek-aspek seperti distribusi pendapatan yang adil, penciptaan lapangan kerja yang layak, akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian lingkungan. (Hill et al., 2013)

Ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini masih menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa aspek, namun masih terdapat disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau di Indonesia. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah-wilayah di Indonesia antara lain adalah pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur. (Nasution, 2022)

Secara umum, wilayah Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara wilayah di luar Jawa masih mengalami keterbelakangan dalam hal pembangunan ekonomi. Hal ini menciptakan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa dalam hal akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, ketimpangan juga terjadi dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan di antara masyarakat Indonesia. Masih terdapat kesenjangan antara golongan yang kaya dan miskin, serta antara kelompok etnis atau sosial ekonomi tertentu. (Rinardi et al., 2023)

Penggunaan Gini Ratio, seperti yang dijelaskan oleh Todaro dan Smith, adalah salah satu metode umum untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi di suatu wilayah. Dengan demikian, penggunaan indikator seperti Gini Ratio dapat membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memahami sejauh mana ketimpangan ekonomi mempengaruhi masyarakat dan untuk merancang kebijakan yang sesuai untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Berikut data Indeks Gini Ratio pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2023

**Tabel 1. Indeks Gini Ratio pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2019-2023**

Provinsi	Gini Ratio Provinsi Per Maret				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	0,319	0,323	0,324	0,311	0,296
SUMATERA UTARA	0,317	0,316	0,314	0,312	0,309
SUMATERA BARAT	0,306	0,305	0,306	0,3	0,28
RIAU	0,334	0,329	0,326	0,326	0,324
JAMBI	0,321	0,32	0,321	0,32	0,343
SUMATERA SELATAN	0,331	0,339	0,341	0,339	0,338
BENGKULU	0,34	0,334	0,326	0,315	0,333
LAMPUNG	0,329	0,327	0,323	0,314	0,324
KEP. BANGKA BELITUNG	0,269	0,262	0,256	0,236	0,245
KEP. RIAU	0,341	0,339	0,343	0,342	0,34
DKI JAKARTA	0,394	0,399	0,409	0,423	0,431
JAWA BARAT	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425
JAWA TENGAH	0,361	0,362	0,372	0,374	0,369
DI YOGYAKARTA	0,423	0,434	0,441	0,439	0,449
JAWA TIMUR	0,37	0,366	0,374	0,371	0,387
BANTEN	0,365	0,363	0,365	0,363	0,368
BALI	0,366	0,369	0,378	0,363	0,362
NUSA TENGGARA BARAT	0,379	0,376	0,381	0,373	0,375
NUSA TENGGARA TIMUR	0,356	0,354	0,346	0,334	0,325
KALIMANTAN BARAT	0,327	0,317	0,313	0,314	0,321
KALIMANTAN TENGAH	0,336	0,329	0,323	0,319	0,317
KALIMANTAN SELATAN	0,334	0,332	0,33	0,317	0,313
KALIMANTAN TIMUR	0,33	0,328	0,334	0,327	0,322
KALIMANTAN UTARA	0,295	0,292	0,292	0,272	0,277
SULAWESI UTARA	0,367	0,37	0,365	0,365	0,37
SULAWESI TENGAH	0,327	0,326	0,316	0,308	0,304
SULAWESI SELATAN	0,389	0,389	0,382	0,377	0,377
SULAWESI TENGGARA	0,399	0,389	0,39	0,387	0,371
GORONTALO	0,407	0,408	0,408	0,423	0,417
SULAWESI BARAT	0,365	0,364	0,356	0,362	0,351
MALUKU	0,324	0,318	0,314	0,301	0,288
MALUKU UTARA	0,312	0,308	0,3	0,279	0,3
PAPUA BARAT	0,386	0,382	0,38	0,37	0,37
PAPUA	0,394	0,392	0,397	0,406	0,386
INDONESIA	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388

Sumber: BPS Indonesia (Indeks Gini Ratio) 34 Provinsi di Indonesia

Dilihat dari tabel 1 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir DI Yogyakarta menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia dengan Indeks Gini Ratio sebagai perhitungan. Provinsi dengan ketimpangan tertinggi kedua adalah DKI Jakarta dengan rasio Gini sebesar 0,431 pada Maret 2023. Angka itu meningkat dari sebelumnya yang sebesar 0,423 poin pada Maret tahun 2022.

Urutan ketiga adalah Jawa Barat dengan nilai rasio Gini sebesar 0,425 poin pada Maret 2023. Angka itu juga meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 0,417 pada Maret 2022.

Gorontalo menyusul di posisi keempat dengan rasio Gini sebesar 0,417 poin pada Maret 2023. Beda dengan tiga provinsi teratas, Gorontalo mengalami penurunan rasio Gini dari Maret 2022 lalu yang sebesar 0,423 poin.

Kelima, Jawa Timur, dengan rasio Gini 0,387 poin per Maret 2023. Angka ini malah meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 0,371 poin pada Maret 2022. Adapun provinsi dengan rasio Gini terendah se-Indonesia pada Maret 2023 adalah Bangka Belitung (0,245); Kalimantan Utara (0,277); dan Sumatera Barat (0,280).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, seperti provinsi. PDRB per kapita mengukur nilai total produksi barang dan jasa di suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduknya. (Latuheru, 2020)

Jika PDRB per kapita suatu provinsi semakin besar, itu menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa per individu di provinsi tersebut lebih tinggi. Ini dapat menandakan adanya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi karena pendapatan rata-rata per individu juga diperkirakan lebih tinggi. Sebaliknya, jika PDRB per kapita semakin kecil, itu bisa menunjukkan bahwa tingkat produksi per individu di provinsi tersebut lebih rendah, yang bisa mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah juga.

Ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia disebabkan oleh berbagai kendala, termasuk perbedaan dalam hal investasi dan potensi sumber daya alam antar provinsi. Provinsi-provinsi dengan infrastruktur yang lebih baik dan lingkungan investasi yang kondusif cenderung menarik lebih banyak investasi, sementara provinsi-provinsi dengan infrastruktur yang kurang berkembang mungkin mengalami kesulitan dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial. (Zafar & Areef, 2010)

Kepadatan penduduk dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi minat investor untuk masuk ke suatu wilayah. Daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi cenderung memiliki pasar konsumen yang lebih besar. Hal ini menciptakan peluang bagi pertumbuhan bisnis lokal dan menarik minat investor untuk memasarkan produk dan layanan mereka di wilayah tersebut. (Restiatun, 2009)

Pandangan Islam tentang pembangunan ekonomi menggarisbawahi pentingnya tindakan yang proaktif dan antisipatif dalam menghadapi tantangan masa depan. Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil dalam pembangunan ekonomi.

Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, serta memastikan bahwa sumber daya ekonomi didistribusikan secara merata untuk

kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembangunan ekonomi, diharapkan dapat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana tentang anjuran untuk bekerja dalam kegiatan perekonomian disebutkan dalam Al-Qur'an (QS.At Taubah: 105):

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan setiap orang mukmin untuk berusaha, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Allah SWT mengetahui segala perbuatan dan usaha yang dilakukan oleh manusia, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang akan diketahui oleh Allah SWT, Rasulullah, dan orang-orang beriman secara keseluruhan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### a. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Hipotesis Neoklasik, yang diungkapkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan neoklasik, memang menarik perhatian para ekonom dan perencana pembangunan daerah. Hipotesis ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan antar wilayah.(Kurniawan et al., 2021)

### b. Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan endogen menekankan peran investasi dalam modal fisik (seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan) dan modal manusia (melalui pendidikan dan pelatihan) dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menginvestasikan dana dalam infrastruktur, seperti jalan raya, jaringan transportasi, listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan memfasilitasi investasi swasta.(Panjaitan et al., 2019)

c. Investasi

Menurut Jogiyanto tentang investasi menekankan aspek penundaan konsumsi untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, investasi tidak hanya mengacu pada pembelian aset keuangan atau fisik, tetapi juga pada pengaliran dana atau sumber daya ke dalam aktivitas produktif yang dapat menghasilkan pengembalian di masa depan. (Tandelilin, 2001)

Investasi berdasarkan teori ekonomi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi. Investasi dalam konteks ekonomi mengacu pada pembelian atau produksi modal barang yang tidak langsung dikonsumsi, tetapi digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa mendatang. Investasi dianggap sebagai salah satu komponen utama dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara, yang mencerminkan total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu.

d. Jumlah Penduduk

Teori Reverend Thomas Malthus, yang dikemukakan dalam karyanya "An Essay on the Principle of Population" pada tahun 1798, merupakan salah satu teori yang menjadi landasan dalam memahami hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Teori Malthus dikenal karena konsep "diminishing returns" atau hasil yang menurun.

Menurut Malthus, pertumbuhan populasi cenderung meningkat secara eksponensial, sementara pertumbuhan sumber daya alam dan produksi cenderung meningkat secara linear atau bahkan kurang dari itu. Ini berarti bahwa, pada suatu titik, pertumbuhan populasi akan melebihi kemampuan masyarakat untuk menyediakan makanan dan sumber daya lainnya, yang pada gilirannya akan mengakibatkan tekanan pada produksi makanan dan penurunan kesejahteraan secara umum. (Maltus, n.d.)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kausal dengan tujuan untuk meneliti hubungan atau pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019-2023. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, investasi diukur dengan total investasi di sektor publik dan swasta, dan jumlah penduduk diukur dengan jumlah penduduk di setiap provinsi. Ketimpangan pembangunan ekonomi diukur dengan indeks Gini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan

(*library research*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistic.

Penggunaan indeks Gini ratio sebagai alat ukur ketimpangan pembangunan dianggap tepat karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang ketimpangan pembangunan di setiap provinsi. Periode 5 tahun (2019-2023) dipilih untuk melihat tren dan pola ketimpangan pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup untuk menunjukkan perubahan signifikan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis panel data dengan menggunakan program *Eviews10*. Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data silang *cross section*. Data runtun waktu biasanya meliputi satu objek tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan).

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

a. Model Estimasi Data Panel

1) *Common Effect Model*

2) *Fixed Effect Model*

3) *Random Effect Model*

b. Uji Pemilihan Model

Dalam menentukan model panel data terbaik yang digunakan, harus dilakukan suatu pengujian pemilihan model. Pengujian model terbaik dilakukan dengan uji Hausman, uji *Lagrange Multiplier* dan uji *Chow*.

c. Uji Koefisien Determinasi

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji  $R^2$ )

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan Persamaan Regresi Linear Data Panel dengan Metode *Random Effect Model* untuk menganalisis data. Pilihan model ini didasarkan pada hasil *Uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Uji Lagrange Multiplier* yang menunjukkan bahwa *Random Effect Model* adalah metode yang paling tepat untuk data panel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* (REM) untuk menganalisis data panel. Hasil analisis regresi REM ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Analisis REM**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.340673	0.007456	45.68890	0.0000
X1	-0.000363	0.000187	-1.934416	0.0548
X2	3.81E-07	4.92E-06	0.077590	0.9382
X3	1.01E-06	4.44E-07	2.280762	0.0239

  

Weighted Statistics			
R-squared	0.052147	Mean dependent var	0.035975
Adjusted R-squared	0.034702	S.D. dependent var	0.008992
S.E. of regression	0.008778	Sum squared resid	0.012560
F-statistic	2.989195	Durbin-Watson stat	0.929348
Prob(F-statistic)	0.032714		

Berdasarkan tabel ringkasan hasil analisis regresi data panel yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disusun berdasarkan rumus berikut:

$$Y = 0.340673237017 - 0.000362683186515 * X1 + 3.81382382528e-07 * X2 + 1.0136060103e-06 * X3$$

Dari persamaan rumus regresi yang telah disusun dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) pada model regresi ini adalah 0.3406. Nilai tersebut menjelaskan bahwa jika variabel-variabel independen pada penelitian bernilai 0, maka nilai ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 0.3406 satuan.
2. Nilai koefisien dari Pertumbuhan Ekonomi (X1) sebesar 0.0003 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% maka ketimpangan pembangunan ekonomi akan menurun sebesar 0.0003%
3. Nilai koefisien dari Investasi (X2) sebesar 3.8138 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Investasi sebesar 1% maka ketimpangan pembangunan ekonomi akan naik sebesar 3.8138%.
4. Nilai koefisien dari Jumlah penduduk sebesar 0,0162 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Jumlah penduduk sebesar 1% maka ketimpangan pembangunan ekonomi akan naik sebesar 0,0162%.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi pada 34 Provinsi Indonesia Tahun 2019-2023**

Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar  $-0.000363$  dengan arah koefisien yang negatif. Nilai probabilitas menunjukkan bahwa nilai taraf signifikan sebesar  $0.0548 > 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini memiliki arah koefisien negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di 34 Provinsi di Indonesia. Hasil tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi, akibatnya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Raharti, Titi Laras dan Oktavianti (2021) dengan judul "Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia". Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi berdasarkan hasil uji regresi pada data panel.

Hasil uji regresi data panel pada penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Sesuai dengan Teori Ekonomi Neo Klasik tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan, tetapi ketimpangan tersebut akan menurun pada tahap yang lebih maju dari pembangunan. Hipotesis ini dikemukakan oleh Simon Kuznets, dan disebut sebagai "hipotesis Kuznets".

Menurut hipotesis Kuznets, pada tahap awal pembangunan ekonomi ketimpangan pembangunan cenderung meningkat karena kelompok tertentu, seperti pemilik modal dan tenaga kerja terampil, lebih banyak merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika perekonomian berkembang, ketimpangan semakin berkurang.

### **Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023**

Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel investasi memiliki nilai koefisien sebesar  $3.81E-07$  dengan arah koefisien yang positif. Nilai probabilitas menunjukkan bahwa nilai taraf signifikan sebesar  $0.9382 > 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa investasi dalam penelitian ini memiliki arah koefisien positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di 34 Provinsi di Indonesia. Hasil tersebut menyatakan bahwa investasi

berdampak positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi, akibatnya H0 diterima dan H1 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustianik Istiqomah (2018) dengan judul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm Dan Investasi (Pma) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi (Studi Kasus di Pulau Jawa Tahun 2011-2016)". Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel investasi mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi berdasarkan hasil uji regresi pada data panel.

Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat bahwa pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat disimpulkan yakni investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan atau penurunan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan atau penurunan, seiring dengan peningkatan atau penurunan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pembangunan.

Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pembangunan antar daerah.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pembangunan pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023**

Berdasarkan hasil uji regresi data panel, variabel Jumlah Penduduk diperoleh nilai koefisien sebesar 1.01E-06 dengan arah koefisien positif. Nilai probabilitas menunjukkan bahwa nilai taraf signifikan sebesar  $0.0239 < 0,05$  dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini jumlah penduduk memiliki arah koefisien positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis awal yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bustam Anggun Pamiati, Nenik Woyanti (2021) dengan judul "Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tpk Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Barlingmascakeb 2013-2019". Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel populasi atau jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi berdasarkan hasil uji regresi pada data panel.

Teori Reverend Thomas Malthus, yang dikemukakan dalam karyanya "An Essay on the Principle of Population" pada tahun 1798, merupakan salah satu teori yang menjadi landasan dalam memahami hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Teori Malthus dikenal karena konsep "diminishing returns" atau hasil yang menurun.

Pertumbuhan populasi atau peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkat secara eksponensial, sementara pertumbuhan sumber daya alam dan produksi cenderung meningkat secara linear atau bahkan kurang dari itu. Ini berarti bahwa, pada suatu titik, pertumbuhan populasi akan melebihi kemampuan masyarakat untuk menyediakan makanan dan sumber daya lainnya, yang pada gilirannya akan mengakibatkan tekanan pada produksi makanan dan penurunan kesejahteraan secara umum.

Menurut Malthus, ketimpangan akan semakin parah karena sumber daya yang terbatas akan lebih sulit diakses oleh populasi yang lebih besar. Orang-orang yang paling miskin akan menderita paling parah karena mereka memiliki akses yang lebih sedikit terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pembangunan**

**Tabel 3. Hasil Uji F (Simultan)**

<i>F-Statistic</i>	<i>Prob (F-Statistic)</i>
2.989195	0.032714

Sumber: *Eviews10* data diolah

Berdasarkan analisis statistik dalam uji signifikansi secara simultan (Uji f), nilai probabilitas F hitung sebesar 0.032714 dan signifikan pada derajat 5%. Berdasarkan hasil pengujian simultan dengan uji F, diketahui probabilitas F hitung sebesar  $0.032714 < \alpha = 5\%$  (0,05), maka dapat disimpulkan variable Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Jumlah Penduduk secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada 34 provinsi di Indonesia.

Artinya, pada hasil estimasi secara bersama-sama atau simultan variabel independen yang terdapat pada model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil Koefisien Determinasi menunjukkan dalam nilai adjusted R-squared sebesar 0,497789 yang berarti variasi variabel Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, jumlah penduduk mampu menjelaskan 3,4702% variasi variabel ketimpangan pendapatan. Sedangkan sisanya sebesar 96,5298% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## **Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Tentang Ketimpangan Pembangunan Ekonomi**

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan pembangunan ekonomi adalah isu yang mendapatkan perhatian khusus. Ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan distribusi yang adil dari kekayaan serta sumber daya.

Beberapa konsep islam seperti Al-'Adl (Keadilan Sosial) Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi kekayaan. Setiap individu harus mendapatkan haknya tanpa ketidakadilan. Serta konsep Al-Mizan (Keseimbangan Ekonomi) Konsep ini menekankan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Ini berarti tidak boleh ada segelintir orang yang menikmati kekayaan yang melimpah sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan. Hal ini sudah diterangkan dalam Surah an-Nisaa (4): 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat ini menegaskan bahwa perintah untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan adalah bagian dari pengajaran terbaik dari Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini adalah fundamental dalam ajaran Islam dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT juga memerintahkan agar ketika menetapkan hukum di antara manusia, dilakukan dengan adil. Ini menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dalam sistem hukum dan peradilan. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau hubungan pribadi.

Keadilan dalam menetapkan hukum mencakup kebijakan ekonomi yang adil, seperti perpajakan yang adil, distribusi sumber daya, dan akses yang merata terhadap peluang ekonomi. Kebijakan yang adil akan memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara merata, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

- a) Pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai koefisien sebesar  $-0.000363$  dan  $\text{sig } 0.0548 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada 34 provinsi di Indonesia.
- b) Investasi diperoleh nilai koefisien sebesar  $3.81\text{E}-07$  dan  $\text{sig } 0.9382 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada 34 provinsi di Indonesia.
- c) Jumlah penduduk diperoleh nilai koefisien sebesar  $1.01\text{E}-06$  dan  $\text{sig } 0.0239 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada 34 provinsi di Indonesia.
- d) Pertumbuhan ekonomi, Investasi, dan jumlah penduduk secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada 34 provinsi di Indonesia.
- e) Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan pembangunan ekonomi sangat ditekankan untuk dihindari. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang membahas pentingnya distribusi kekayaan yang adil adalah Surah Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip yang relevan dengan pengelolaan dan distribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat sebagai salah satu rukun Islam wajib diterapkan dan dikelola dengan baik untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Sedekah juga dianjurkan sebagai bentuk bantuan sukarela untuk mengurangi ketimpangan.

### Saran

- a) Secara ilmiah, Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.
- b) Secara teoritis, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyelidiki lebih lanjut bagaimana pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah penduduk berkontribusi pada peningkatan atau penurunan ketimpangan pembangunan ekonomi.
- c) Secara praktis, kepada pihak pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan memberdayakan kebijakan terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia, seperti: Memastikan akses yang setara terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas di seluruh daerah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Hill, H., Khan, M. E., & Zhuang, J. (2013). Membangun perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 39(1).
- Kurniawan, D., Hermawan, W., Sunandi, I., & Fadhila, S. Z. (2021). Pendekatan hukum terhadap isu-isu lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan: Tantangan dan prospek. *Journal on Education*, 3(4), 643–658.
- Latuheru, A. (2020). Pengaruh sektor tersier terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Tolikara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 16–24.
- Maltus, D. T. R. (n.d.). Asuransi syari'ah dan asuransi konvensional.
- Nasution, M. (2022). Potensi dan tantangan blue economy dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Kajian literatur. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2).
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61.
- Restiatun, R. (2009). Identifikasi sektor unggulan dan ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 10(1), 30666.
- Rinardi, H., Indrahti, S., & Masruroh, N. N. (2023). Ketimpangan ekonomi Jawa dan luar Jawa dan perkembangan perdagangan antarpulau di Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 8(1), 29–43.
- Tandelilin, E. (2001). Analisis investasi dan manajemen portofolio. BPFE.
- Zafar, I., & Arief, S. (2010). Indonesia: Kendala kritis bagi pembangunan infrastruktur. Islamic Development Bank.